# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RASIONALITAS KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SUKABUMI.

## **Acep Suherman**

Universitas Muhammadiyah Sukabumi acepsuherman@ummi.ac.id

## Andri Indrawan

Universitas Muhammadiyah Sukabumi andriindrawan@ummi.ac.id

## Tina Kartini

Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tinakartini386@ummi.ac.id

#### **ABSTRACT**

Land and building tax is local revenue that is collected from the community for land and building ownership. The rationality of the people in this study is shown in the form of public awareness in accepting and paying land and building taxes. The purpose of this study is to explain how people are invited to participate rationally in increasing land and building taxes and being obedient in paying taxes. The research method used in this study uses quantitative methods. The results of the statistical test show that the variable bearing power has a positive and significant effect on the awareness as well as the benefits of taxes variable which has a positive and significant effect on the awareness as a manifestation of community participation and mutual cooperation under Development.

**Keywords**: Bearing Power, Benefit, Awareness

#### **ABSTRAK**

Pajak bumi dan bangunan merupakan pendapatan asli daerah yang dipungut kepada masyarakat atas kepemilikan tanah dan bangunan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana masyarakata diajak untuk berpartisifasi secara rasional dalam kenaikan pajak bumi dan bangunan serta patuh dalam membayar pajak di kota sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode kuantitatif. Hasil dari uji statistik didapat bahwa variabel daya pikul wajib pajak berpengaruh postitf dan signifikan terhadap varabel kesadaran wajib pajak begitu juga dengan variabel kemanfataan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak sebagai perwujudan dari

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menerima kenaikan dan patuh dalam membayar pajak diharapkan pemerintah harus menunjukan kemanfaatan pajak dalam bentuk pembangunan sarana publik dan pelayanan publik. Sedangkan untuk meningkatkan daya pikul masyarakat pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam bentuk pembuatan akses jalan ditempat objek pajak, sehingga nilai ekonomi (jual) objek meningkat.

Kata kunci: Daya pikul, Kemanfaatan, Kesadaran.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan yang digalakan oleh pemerintah kota sukabumi harus didukung dengan sumber dana yang memadai yang berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pendapatan lain yang sah. Pemerintah daerah yang maju adalah pemerintah daerah yang mampu membiayai pembangunannya secara mandiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah sehingga tidak memilik ketergantungan kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi sebagai sumber pendapatan dan optimalisasi penggunaaan pendapatan daerah. Pajak mencerminkan partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam bidang pembiayaan pembangunan, maka semua objek pajak dikenakan tarif pajak sehingga hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk tujuan kepentingan masyarakat luas guna membiayai pembangunan di wilayah Kota Sukabumi, Hasil dari pembangunan baik infrastruktur berupa fasilitas umum maupun pelayanan publik akan dirasakan hasilnya oleh semua masyarakat dan terlihat nyata, sehingga akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sekaligus menggambarkan sifat kegotongroyongan masyaraka dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu pendapatan asli daerah adalah berupa pajak bumi dan bangunan, yang hampir disebagian kota dan kabupaten masih memberikan kontribusi yang rendah terhadap pendapatan asli daerah, karena kebijakan ini tidak populer sebab berhubungan langsung dengan seluruh mayarakat pemilik tanah dan bangunan. Penelitian terdahulu cenderung membahas tentang cara memungut pajak, penggunakan pajak atau kepatuhan wajib pajak, sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Wiwik dan Mohammad Sofyan (2018) dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Jakarta mengambil tema " Analisis efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Kota Depok. Yulia Anggara sari dari Universitas Pendidikan Indonesia 2010 mengambil tema "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah di kota Bandung. Rima Adelina (2013) dari universitas Negeri Surabaya mengambil tema "Analisis efektivitas dan Kontribusi Penermaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik. Arif Rahma (2018) dari Universitas Negeri Padang mengambil tema "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan" sedangkan siti salmah (2018) dari sekolah tinggi Ilmu Ekonomi-LPI Makasar mengambil tema "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan". Pemerintah memiliki otoritas dalam menaikan besarnya tarif Pajak dan penggunaannya, sesuai dengan definisinya bahwa pajak dipungut oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dengan tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada wajib pajak, namun demikian agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat sebaiknya dibuatkan kajian yang mendalam terhadap kenaikan pajak sehingga masyarakat bisa menerima kenaikan pajak bumi dan bangunan secara rasional.". yang menjadi masalah yang konkrit dalam pajak bumi dan bangunan bukan cara memungut dan menggunakan pajak tetapi bagaimana mengugah masyarakat wajib pajak untuk dengan sukarela secara rasional untuk menerima kenaikan besaran pajak dan membayar pajak oleh karena itu saya tertarik dalam penelitian ini dengan mengambil tema Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rasionalitas kenaikan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi. Rasionalitas dalam penelitian ini diproksikan oleh kesadaran masyarakat dalam menerima kenaikan pajak dan patuh membayar paka, sedangkan faktor yang mempengaruhinya diproksikan dengan daya pikul dan kemanfaatan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana masyarakat diajak untuk berpartisifasi secara rasional dalam kenaikan pajak bumi dan bangunan serta patuh dalam membayar pajak di kota sukabumi. Memuat latar belakang masalah penelitian yang ingin diselesaikan, kesenjangan antara kenyataan dan ideal, dan tujuan.

## TELAAH LITERATUR

Definisi pajak menurut undang-undang No 28 Tahun 2007 pajak adalah iuran yang dipungut kepada masyakat yang bisa dipaksakan menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka memakmurkan rakyatnya.

## Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), ada tiga sistem pemungutan pajak yang terdiri dari:

a. Official Assessment System

Yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk menentukan besanya pajak yang terutang bagi wajib pajak.

b. Self Assesment System

Yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding sistem.

Yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. (bukan Fiskus maupun Wajib Pajak.)

## Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas Pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya buku "An Inquiri into the Natura and Clauses of the Wealth of Nation" terdiri dari :

## a. Equality

Asas ini mendorong agar dalam pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak(ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima, adil artinya bahwa setiap pajak yang dipungut untuk membiayai pengeluaran negara sebanding dengan kepentingan dan mafaat yang diterima.

## b. Certainty

Dalam pengenaan pajak harus dihindari sikap kesewenang-wenangan dalam penentuannya. Sehingga wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pajak yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan waktu pembayarannya.

#### c. Convenience

Asas ini mendorong agar memperhatikan waktu yang tepat dalam pemungutan pajak sehingga perlu memperhatikan kondisi wajib pajak sehingga tidak menyulitkan wajib pajak. Pembayaran pajak harus melihat saat-saat wajib pajak memperoleh penghasilan (pay as you earn) sehingga wajib pajak.

## d. Economy.

Asas ini mendorong untuk memperhatian tingkat keekonomisan atau effisiensi dalam memungut pajak yaitu agar biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak, sehingga biaya untuk memperolehnya harus lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang dipungut.

## Asas Pembagian Beban Pajak

Asas ini menghendaki bahwa pajak yang dikenakan kepada masyarakat dibebankan secara adil, ada dua hal yang mendukung asas ini yaitu :

## a. Teori daya pikul

Teori ini menjelaskan bahwa pajak yang diebebankan kepada masyarakat disesuaikan dengan daya pikul masing-masing masyarakat, yaitu daya pikul terhadap pajak bersumber dari penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya.

## b. Prinsip Kemanfaatan/Kenikmatan (Benefit Principle)

Menurut asas ini pengenaan pajak seimbang dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak dari fasilitas-fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan prinsip benetif ini mengukur aspek keadilan dalam perpajakan (Miyasto, 1997).

#### Subjek Pajak dan Objek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi maupun badan usaha yang telah ditetapkan menjadi subjek pajak sedangkan objek pajak adalah sumber pendapaatan yang dikenakan pajak atau dipungut oleh negara.

## Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang harus dipungut oleh pemerintah sebagai pemungut dan pegelola pajak atau disetor oleh wajib pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang maupun badan.

## Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (objek PBB) adalah tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi: Sawah, Ladang, Kebun, Tanah, Pekarangan, Tambang, Sedangkan objek bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi: Rumah tinggal, Bangunan usaha, Gedung bertingkat, Pusat perbelanjaan, Pagar mewah, Kolam renang, Jalan tol. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (subjek PBB) adalah orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya.

## Dasar Pengenaan atas Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar pengenaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). setiap daerah memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu: Bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, Letak, Rekayasa, Kondisi lingkungan, Pemanfaatan, Peruntukan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen lalu diolah dengan menggunakan SPSS. Variabel-variabel tersebut di beri skore dengan skala likert antara 1 sampai dengan 5, sehingga diperoleh data kuantitatif berupa angka-angka.

## Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah subjek pajak bumi dan bangunan yang tersebar dalam kategori

- 1. Perumahan sebanyak 12.870 buah.
- 2. Pertokoan atau pusat binis 3.190.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 250 sampel yang terdiri dari 150 sampel diambil dari perumahan secara acak dan 100 sampel diperoleh dari pertokoan di ambil secara acak, serta mengisi kuesioner yang disebar.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar kepada subjek pajak bumi dan bangunan dengan kategori perumahan dan pusat bisnis, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan data digital.

#### Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan, daya pikul subjek pajak, Kemanfaatan Pajak.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan regresi linier berganda dengan alat bantu menggunakan Statistical Program for Social Sciences (SPPS)

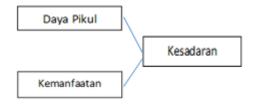
#### Kerangka Pemikiran

Daya pikul wajib pajak merupakan kemampuan subjek pajak dalam membayar pajak yang terhutang, daya pikul ini diukur dengan kemampuan wajib pajak untuk menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, serta nilai jual objek pajak.

Kemanfaat atau kenikmatan yang diperoleh wajib pajak merupakan kemanfaat yang dirasakan dan disaksikan oleh wajib pajak berupa fasilitas umum yang disediakan pemerintah, fasilitas pelayanan dan tempat objek pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran yang tumbuh karena ia memiliki daya pikul dan melihata serta merasakan manfaat pajak bagi wajib pajak dan lingkungannya. Jika digambarkan akan terlihat sebagai berikut :

\Gambar 1 Kerangka Pemikiran Hubungan Daya Pikul, Kemanfaatan, Kesadaran



#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota sukabumi adalah sebuah salah satu kota madya yang ada diprovinsi jawabarat, kota ini di perbatasan langsung atau dikelilingi oleh kabupaten sukabumi baik dari arah utara, selatan bahkan dari timur dan barat, kota sukabumi memiliki 33 kelurahan dan 7 kecamatan dengan luas areal 4.800.231 Ha. Pendapatan kota bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut ini adalah tabel realisasi pendapatan Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2020 dan 20221 yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Sukabumi

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Sukabumi (Rupiah)					
Jenis Pendapatan	2020	2021			
1.Pendapatan Asli Daerah (PAD)	343,755,662,641	344,060,591,430			
1.1 Pajak Daerah	50,022,372,326	54,442,710,141			
1.2 Retribusi Daerah	7,041,582,511	6,604,301,840			
1.3 Hasil perusahaan Milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	4,284,853,811	4,346,251,729			
1.4 Lain-Iain PAD Yang Sah	282,406,853,993	278,667,327,720			
2.Dana Perimbangan	657,864,524,231	703,688,702,118			
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	41,378,475,304	100,231,153,531			
2.2 Dana Alokasi Umum	471,842,967,000	463,567,655,000			
2.3 Dana Alokasi Khusus	144,643,081,927	139,889,893,587			
3.Lain-lain Pendapatan Yang Sah	125, 260, 323, 942	196,015,130,535			
3.1Pendapatan Hibah	40,302,949,491				
3.2 Dana Darurat	-	39,409,328,056			
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerinta Daerah lainnya	65,094,068,451	156,605,802,479			
3.4 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Daerah	19,863,306,000				
3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainyya	-				
3.6 Lainnya	27,957,159,048				
Jumlah	1.126.880.510.814	1.243.764.424.083			

Source Url: https://sukabumikota.bps.go.id/indicator/13/219/1/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-sukabumi.html

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah kota sukabumi pada tahun dua tahun terakhir meningkat 10,37 % dibandingkan dengan tahun 2020, namun kenaikan tersebut masih didominasi oleh dana perimbangan naik sebesar 7 %, sedangkan untuk menjadi sebuah kota yang mandiri kota sukabumi harus mampu

membiayai kebutuhan kota sukabumi yang bersumber dari pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah harus ditingkatkan dengan cara mencari potensi sumber pendapatan.

Pendapatan Daerah 2020,2021

Pendapatan Daerah 2020

Pendapatan Daerah 2020

Pendapatan Asli Daerah (PAD) \* 2.Dana Perimbangan 3.Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Pajak 2021

Pendapatan Pajak 2021

Pendapatan Pajak 2021

\*\*Pajak Bumi dan Bangunan \*\*BPHTB \*\* lain-lain

Berikut ini adalah grafik pendapatan daerah tahun 2020 dan 2021.

Pendapatan daerah tahun 2020. Rp 657,864,524,231 atau 58 % bersumber dari Dana perimbangan, sedangkan pendapatan asli daerah Rp 343,755,662,641 atau 31% dan Pendapatan lain yang sah Rp 125.260.323.942 atau 11 %. Pendapatan daerah tahun 2021. Rp 703,688,702,118 atau 56 % bersumber dari Dana perimbangan, sedangkan pendapatan asli daerah Rp 344,060,591,430 atau 28 % dan Pendapatan lain yang sah Rp 196.015.130.353 atau 16 %.

## Pendapatan Pajak

Berikut ini adalah tabel pendapatan pajak:

Tabel 2 Pendapatan Pajak 2020,2021

Pendapatan Pajak	2020	2021
Pajak Bumi dan Bangunan	8,969,164,422.00	10,062,860,494
ВРНТВ	16,092,958,852.00	17,373,725,441
lain-lain	24,960,249,052.00	27,006,124,206
	50.022.372.326.00	54.442.710.141

Sumber: https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/pemerintah-kota-sukabumi/pbb-dan-bphtb-kota-sukabumi-2021-capai-rp-27-miliar.

untuk memudahkan dalam menjelaskan berikut ini disajikan dalam pie grafik kondisi pendapatan pajak kota sukabumi tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut :

Gambar 3 Pendapatan Pajak 2020



Pada tahun 2020 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 8.969.164.422. atau sebesar 18 % dari total pajak yang diperoleh, sedangkan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp 16.092.958.852 atau 32 % dari total pendapatan.

Gambar 4 Pendapatan Pajak 2021



Pada tahun 2021 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 10.062.860.494 atau sebesar 18 % dari total pajak yang diperoleh, sedangkan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp 17.373.725.441 atau 32 % dari total pendapatan. Dari kedua grafik tersebut pajak bumi dan bangunan kota sukabumi mengalami kenaikan secara kuantitatif akan tetapi secara proporsional dari

keseluruhan pendapatan pajak tetap tidak berubah dengan komposisi sebesar 18 % begitu juga dengan BPHTB. Ini bisa dianalisa secara mendalam dengan cara membandingkan antara hasil pajak bumi dan bangunan dengan BPHTB ini menunjukan kemunkinan ada perubahan peruntukkan tanah dan bangunan serta peningkatan nilai jual objek pajak.

## Hasil Uji Statistik

Berdasarkan teori daya pikul dan kemanfaatan beban pajak yang dihubungkan dengan kesadaran masyarakat dalam menanggung beban pajak dalam bentuk kesukarelaan untuk membayar pajak dan menerima kenaikan pajak yang dalam hal ini adalah pajak bumi dan bangunan. dari hasil uji statistik regresi linier berganda diperoleh data sebagai berikut :

## 1. Hasil Uji Koeffisien

Dari hasil uji koeffisien dapat diperoleh informasi mengenai persamaan regresi, hubungan varabel secara parsial antara varibel independen dengan varibel dependen. hasil uji koefisien terhadap varibel daya pikul (X1), Kemanfaatan (X2) dan Varibel Kesadaran (Y), ini menunjukan sebagai berikut:

**Tabel 3 Tabel Coefficients** 

C oefficients a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	5.053	1.198		4.218	0.000	
	Daya Pikul	0.218	0.050	0.227	4.375	0.000	
	Kemanfaatan(Benefit)	0.599	0.055	0.564	10.883	0.000	
a. Depende	a. Dependent Variable: Kes adaran						

Dari tabel diatas diperoleh informasi sebagai berikut :

## a. Persamaan Regresi

$$Y = \dot{\alpha} + {}^{\beta}X1 + {}^{\beta}X2 + e .$$

Kesadaran (Y) = 5.053 + 0, 218 X1+ 0,599 X2 + e, ini menunjukkan bahwa Varibel daya pikul(X1) akan menaikan kuantitas varibel Kesadaran membayar pajak dan kenaikan pajak (Y) sebesar 0,218 satuan (X1), dengan catatan varibel lain dianggap tidak ada (0), begitu juga dengan variabel Kemanfaatan X2 akan menaikan varibel Kesadaran (Y) sebesar 0,599 satuan (X2), dengan catatan varibel lain (X1) dianggap tidak ada (0).

b. Pengaruh variabel Daya Pikul terhadap Variabel Kesadaran.

Dari hasil uji diatas menunjukan bahwa variabel daya pikul wajib pajak (X1) berpengaruh terhadap Variabel Kesadaran (Y), hal ini bisa dilihat dengan cara membandingkan antara t hitung dengan t tabel, jika t hitung > dari pada t tabel maka variabel tesebut berpengaruh. Dari hasil uji diatas t hitung (4.375) sedangkan t tabel (1.9696) dengan tingkat signifikan yaitu 0,05>0.00, artinya Varibel Daya pikul berpengaruh signifikan terhadap varibel Kesadaran (Y).

## c. Pengaruh Varibel Kemanfaatan terhadap Variabel Kesadaran.

Dari hasil uji diatas menunjukan bahwa variabel daya Kemanfaaan (X2) berpengaruh terhadap Variabel Kesadaran (Y), hal ini bisa dilihat dengan cara membandingkan antara t hitung dengan t tabel, jika t hitung > dari pada t tabel maka variabel tesebut berpengaruh. Dari hasil uji diatas t hitung (10.883) sedangkan t tabel(1.9696) dengan tingkat signifikan yaitu 0,05>0.00, artinya Varibel kemanfatatan berpengaruh signifikan terhadap varibel Kesadaran (Y).

# 2. Hasil uji Anova

Dari hasil uji anova diperoleh informasi data mengenai pengaruh secara besama-sama (simultan) antara variabel daya pikul dan kesadaran secara simultan terhadap variabel kesadaran, dengan hasil uji sebagai berikut :

**Tabel 4 Tabel Anova** 

ANO VA <sup>a</sup>						
		Sum of		Mean		
Model		Squares	df	Square	F	Sig.
1	Regression	272.521	2	136.261	120.419	.000 <sup>t</sup>
	Residual	279.495	247	1.132		
	Total	552.016	249			
a. Dependent Variable: Kesadaran						
b. Predictors: (Constant), Kemanfaatan (Benefit), Daya Pikul						

dari tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa secara simultan variabel daya pikul dan kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kesadaran (Y), hal ini bisa dilihat dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel yaitu jika F hitung > besar dari F tabel makan bisa disimpulkan varibel X1 dan X2 berpengaruh terhadap varibel Y, dan signifikan si diuji dengan melihat tingkat signifikansi yaitu membandingkat tingkat kepercayaan 0,05 > dari signifikasi hasil perhitungan. Dari tabel diatas dapat diperoleh T hitung (120.419) > t tabel (3.0324) dengan tingkat sinifikasi 0,05>0,000

# 3. Hasil Uji diterminasi.

Dari uji diterminasi diperoleh informasi mengenai model yang menjelaskan variabel dependen yaitu kesadaran dapat dijelaskan oleh variabel daya pikul dan kemanfaat.

**Tabel 5 Model Summary** 

Model Summary <sup>b</sup>						
				Std. Error		
			Adjusted	ofthe		
Model	R	R Square	R Square	Estimate		
1	.703ª	0.494	0.490	1.06375		
a. Predictors: (Constant), Kemanfaatan(Benefit), Daya Pikul						
b. Dependent Variable: Kesadaran						

Dari tabel diatas dipeoleh mengenai hasil uji diterminasi yaitu r2 = 0,7032 = 0,494 artinya varibel kesadaran dapat dijelaskan oleh varibel daya pikul dan kemanfaatan sebesar 0,494 atau 49,4 % sedangkan sisanya dijelaskan oleh varibel lain

#### Pembahasan

Dari hasil uji koefisien yang menyatakan bahwa daya pikul berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa masyarakat memiliki kesadaran terhadap kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan serta patuh untuk membayar pajak. Kesadaran tersebut timbul karena masyarakat memiliki daya pikul (kemampuan) hal ini diukur dengan penghasilan dan penyisihan penghasilan masyarakat serta manfaat keekonomian objek pajak. Dari hasil uji koeffisien terhadap pengaruh varibel kemanfaatan terhadap kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa kemanfaatan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa timbulnya kesadaran masyarakat untuk menerima kenaikan pajak bumi dan bangunan serta patuh membayarnya sebagai dampak dari wajib pajak atau masyarakat melihat dan merasakan manfaat pajak bagi pembanguan, hal ini diukur dengan indikator yang ditanyakan kepada wajib pajak mengenai pembangunan fasilitas publik, peningkatan pelayanan publik, akses objek pajak terhadap fasilitas publik.

## **SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemerintah kota sukabumi masih memungkinkan untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan, dengan cara melakukan pendataan ulang karena sudah banyak perubahan tata kota yang asalnya pesawahan menjadi perumahan.
  - b. Dari hasil uji pengaruh antara varibel daya pikul, kemanfaatan terhadap kesadaran wajib pajak dan hasilnya menyatakan memiliki pengaruh positif dan signfikan maka pemerintah harus bisa menunjukan kemanfaatan pajak bagi pembangunan dalam bentuk pembangunan fasilitas publik dan pelayanan publik.
  - c. Dengan pembagangunan fasilitas publik dan pelayanan yang baik akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

#### **SARAN**

Dari kesimpulan diatas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Dari hasil uji koefisian yang menyatakan bahwa kemanfaatan memiliki pengaruh posisitf dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak untuk menerima kenaikan dan membayar pajak maka Pemerintah harus berupaya meningkatkan pembangunan fasilitas publik dan pelayanan publik.
  - b. Dari hasil uji koefisian yang menyatakan bahwa daya pikul memiliki pengaruh posisitf dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak untuk menerima kenaikan dan membayar pajak maka pemerintah harus berupaya untuk mendorong perekonomian masyarakat.

c. Sebelum menaikan pajak maka sebaiknya dibuatkan dulu kajian dan studi kelayakannya agar tidak bergejolak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arif Rahma (2018) Universitas Negeri Padang "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan". http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan, Edisi Revisi 2018. Jakarta: Andi

Marsyahrul, Toni. 2006. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Grasindo

- Miyasto. 1997. Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global. Semarang: Diponegoro University Press.
- Rima Adelina (2013) Universitas Negeri Surabaya "Analisis efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik". https://scholar.google.com/scholar?lookup=0&q=+Analisis+efektivitas+da n+Kontribusi+Penermaan+Pajak+Bumi+dan+Bangunan+terhadap+Pendap atan+Asli+Daerah+Gresik&hl=id&as\_sdt=0,5
- Siti salmah (2018) STIE-LPI Makasar mengambil tema "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan" http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/2443
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yulia Anggara Universitas Pendidikan Indonesia 2010 "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah di kota Bandung" http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/309.
- Wiwik dan Mohammad Sofyan (2018) STIAMI Jakarta "Analisis efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Kota Depok. https://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9.